

PILKADA KULONPROGO 2024

Bebas dari Isu SARA dan Intoleransi

PENGASIH (KR) - Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulonprogo dinilai relatif sangat kondusif. Tidak terjadi konflik karena isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) maupun intoleransi selama Pilkada 2024. "Situasi pelaksanaannya lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat dianggap lebih dewasa dalam bersikap maupun merespon situasi yang berpotensi memicu konflik.



KR-Widiastuti
Wahib Jamil Sag MPd

Selasa (10/12).

Sementara itu, masyarakat di Kulonprogo, termasuk organisasi masyarakat (ormas) saat ini sudah memiliki cara pandang yang lebih terbuka," ungkap Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil Sag MPd,

Diharapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo terpilih untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat. Sekaligus mempertahankan situasi yang

kondusif. "Sebab religiusitas bagian pula dari fondasi dasar serta visi-misi pemimpin dalam membangun Kulonprogo. Kerukunan itu juga menjadi dasar kemajuan pembangunan daerah," ujar Wahib Jamil.

Sementara terkait paslon bupati dan wabup terpilih, saat ini menurut Ketua KPU Kulonprogo Budi Priyana, tinggal melakukan penetapan paslon terpilih dari Pilkada 2024. Penetapannya dilakukan lewat Rapat Pleno Terbuka. "Kami masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar untuk melakukan penetapan paslon terpilih," kata Budi. (Wid)

TERDAMPAK CUACA EKSTREM

Pembangunan Jalan Gunungkidul-Klaten Terhambat Longsor

WONOSARI (KR) - Faktor cuaca akibat tingginya curah hujan dan dampak cuaca ekstrem yang terjadi saat ini menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembangunan jalan baru dan normalisasi ruas jalan Hargomulyo - Watugajah di kawasan Tanjakan Clongop, Watugajah, Gedangsari menghubungkan antara Kabupaten Gunungkidul-Klaten, Jawa Tengah. Padahal progres pembangunan saat ini sudah mencapai 96 persen. Sementara memasuki akhir bulan ini pembangunan tinggal pemasangan lampu dan perlengkapan sarana jalan lainnya. "Proses pembangunan di ruas jalan Clongop terhambat akibat terjadi longsor dan perlu ada antisipasi agar hujan yang turun tidak berdampak terhadap pembangunan tersebut," kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Tri Murtoposidi saat meninjau lokasi.

Terkait dengan longsor yang menyebabkan material longsor menutup badan jalan dan rusak yakni dengan metode kon-

struksi menggunakan teknik penyemprotan beton atau mortar pada permukaan dengan tekanan pneumatik yang tinggi (shotcrete) di sekitar tebing longsor menjadi terhambat. Karena untuk kondisi cuaca dalam beberapa hari belakangan cukup ekstrem dan berpengaruh terhadap proses pembangunan. Terkait dengan adanya hambatan itu maka perlu ada antisipasi agar hujan yang turun tidak berdampak terhadap pembangunan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menutup lahan dengan terpal. "Karena keterbatasan anggaran tidak semua dinding bukit hasil pengeprasan bisa dilakukan shotcrete tetapi antisipasi agar terus dilakukan," ucapnya.

Terpisah Kapolsek Gedangsari, AKP Suryanto SPd mengatakan longsor yang terjadi pada Sabtu (7/12) menutup badan jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Lokasi longsor tepat berada di ruas jalan Clongop dan dampaknya untuk arus lalu-lintas kedua arah dialihkan melalui Jelok. (Bmp)

POLRES KULONPROGO

Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik



KR-Istimewa
AKBP Dr Wilson Bugner F Pasaribu (kedua kiri) menerima piagam

WATES (KR) - Polres Kulonprogo menerima piagam penghargaan atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024. Piagam diserahkan anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya kepada Kapolres Kulonprogo AKBP Dr Wilson Bugner F Pasaribu di Hotel Swiss-Bell Yogyakarta, Selasa (10/12).

Polres Kulonprogo mendapat nilai tertinggi nasional dibanding Polres lain di Indonesia dengan nilai 97,61 atau kualitas ter-

tinggi/zona hijau. Peringkat dua diraih Polres Karanganyar dengan nilai 97,52 dan peringkat tiga Polresta Cirebon dengan nilai 97,27.

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengapresiasi peningkatan signifikan dalam mutu pelayanan publik selama periode 2021-2024. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah penyelenggara yang masuk zona hijau, dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 penyeleng-

gara pada 2024.

"Semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam penilaian pelayanan publik, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas pelayanan semakin meningkat. Ini bukan hanya angka, namun mencerminkan perubahan mendalam dalam budaya di berbagai institusi. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, serta tekad aparat negara untuk bertransformasi menuju pelayanan publik yang lebih baik," ujar Dadan.

Perubahan pendekatan dalam pengawasan pelayanan publik sangat penting. Ombudsman mendorong penyelenggara tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat, namun juga membangun hubungan yang solid dengan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang responsif, transparan dan terpercaya. (Dan)

BUPATI KUNJUNGI LPP YOGYAKARTA

Optimalkan Lahan Karst Curah Hujan Rendah

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mengunjungi Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Hal ini untuk mendiskusikan pengembangan teknologi pertanian yang relevan dengan kondisi wilayah Gunungkidul. H Sunaryanta mengatakan, pengembangan inovasi teknologi sangat penting untuk mendukung para petani memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Gunungkidul. "Diskusi berfokus pada optimalisasi lahan karst dengan curah hujan rendah, guna meningkatkan produktivitas pertanian lokal," kata H Sunaryanta, Senin (9/12).

Diungkapkan, Pemkab membutuhkan terobosan



KR-Istimewa
H Sunaryanta saat berkunjung ke Politeknik LPP.

teknologi agar tanah di Gunungkidul dapat dimanfaatkan lebih optimal. Termasuk dalam mendukung pengembangan tanaman karet. Meskipun tanaman ini membutuhkan air, pemkab sedang mencari solusi teknologi rekayasa untuk mengatasinya.

"Pengembangan tanaman jati sering terkendala waktu panen yang sangat lama. Oleh karena itu, pendekatan baru melalui kerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif," ujarnya. (Ded)

TINDAK LANJUT RAKOR PEMBANGUNAN

Sejumlah Proyek Terancam Gagal

WONOSARI (KR) - Sebagai tindak lanjut perintah Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dalam rapat koordinasi pembangunan (rakorbang), Senin (9/12), sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengecekan proyek-proyek yang penyelesaiannya terancam tidak tepat waktu.

Proyek kritis yang dilakukan ceking, Selasa (10/12) antara lain proyek parkir wisata Nglanggeran yang pengerjaan sebenarnya sudah selesai 91,17 persen. Tetapi penyelesaiannya lamban karena hanya ada 18 tenaga kerja. Sedangkan untuk renovasi stadion sudah mencapai 90,76 persen sekarang sedang dikebut pengerjaannya. "Sesuai dengan kontrak proyek tersebut pencairannya paling lambat 20 Desem-

ber, jika melampui harus mendapat persetujuan Sekda sampai 30 Desember," kata Asisten Administrasi Pembangunan Ir Eddy Praptono MSi.

Proyek lain yang terancam tidak selesai tepat waktu, proyek padat karya Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Material proyek sudah terkirim di lapangan, namun pelaksanaannya terkendala oleh cuaca. Meski demikian Kepala dinasnya optimis



KR-Istimewa
Proyek Parkir Wisata Nglanggeran, Patuk termasuk proyek kritis

dapat terselesaikan 100 persen akhir Desember. Dalam rapat koordinasi lalu Bupati meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah melakukan ceking lapangan sebelum menerima penyerahan pekerjaan. Dalam paparan Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta SIP

MSi realisasi pekerjaan fisik rata-rata 81,87 persen. Penyelesaian tertinggi dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 97,34 persen dan terendah Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Tenaga Kerja 35,11 persen. (Ewi)

DAPUR UMUM BELUM SIAP

Ditunda, Uji Coba Pemberian Makan Bergizi Gratis

WONOSARI (KR) - Rencana uji coba pemberian makan bergizi gratis di tiga jenjang satuan pendidikan yang semula dijadwalkan Senin (9/12) ditunda. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul, Nunuk Setyowati MM mengatakan bahwa penundaan ini lantaran ketidaksiapan dapur umum yang akan mengolah makanan bergizi yang akan didistribusikan kepada para siswa. "Guru atau pihak sekolah agar tidak dilibatkan dalam teknis pelaksanaan program pemberian makan bergizi gratis dan perlu fokus untuk mengajar," katanya.

Semula selain SDN 1 Wonosari, ada tiga satuan pendidikan yang menjadi lokasi uji coba makan

bergizi gratis, yaitu SMPN 1 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, dan SMKN 3 Wonosari. Nmaun hingga saat ini, Disdik belum mendapat petunjuk teknis pelaksanaan program. Uji coba yang sebelumnya juga direncanakan digelar di SDN 1 Wonosari pada Senin (9/12) juga ditunda lantaran ketidaksiapan dapur umum tersebut. Dengan penundaan ini pihaknya belum mengetahui pasti kapan ujicoba akan dilaksanakan. Karena Kalau ketika penerimaan rapot tidak bisa uji coba kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang. "Mudah-mudahan pada awal tahun 2025 ujicoba bisa kami lakukan," imbuhnya.

Kepala SDN 1 Wonosari, Joko Widiyanto mengatakan di sekolahnya memiliki 505 siswa nantinya akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok kelas 1, 2, dan 3; lalu, kelompok kelas 4, 5, dan 6. Tiap kelompok tidak makan bersama-sama. Makanan yang datang pukul 08.00 WIB dijadwal untuk kelompok pertama. Adapun makanan yang datang pukul 10.00 WIB untuk kelompok kedua. Menurut Joko, pembagian jam makan ini akan membuat pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

"Pembagian makanan nantinya akan menyesuaikan jumlah siswa," ujarnya. (Bmp)

Bawaslu Kulonprogo Temukan 5 Kendala di TPS

WATES (KR) - Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kulonprogo beserta jajaran pengawas adhoc se-kabupaten dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024 pada Rabu (27/12), ditemukan setidaknya lima kendala yang terjadi di TPS.

"Permasalahan yang ada di TPS, adalah TPS yang mengalami kekurangan surat suara sebanyak 1 TPS, TPS yang mengalami kelebihan surat suara sebanyak 11 TPS, TPS yang mengalami tertukar logistik sebanyak 1 TPS, TPS yang kurang ramah disabilitas sebanyak 4 TPS, serta Pengawas TPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS," papar Muh Isnaini STP MM, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas pada Bawaslu Kulonprogo, Selasa (10/12).

Rincian kendala yang

ditemukan adalah TPS yang mengalami kekurangan surat suara Demangrejo Sentolo 004 Kekurangan 20 surat suara. TPS yang mengalami kelebihan surat suara Giripeni Wates 003 Kelebihan 20 surat suara, Wates, Wates 005 kelebihan 1 surat suara, Sendangsari Pengasih 009 kelebihan 2 surat suara, Kalirejo Kopak 004 kelebihan 20 surat suara, Pendoworejo Girimulyo 006 kelebihan 1 surat suara, Purwosari Girimulyo 002 kelebihan 2 surat suara Donomulyo Nanggulan 003 kelebihan 1 surat suara, Gerbosari Samigaluh 003 kelebihan 1 surat suara, Nargosari Samigaluh 003 kelebihan 1 surat suara, Pagerharjo Samigaluh 007 kelebihan 1 surat suara, Banjaroyo Kalibawang 001 kelebihan 2 surat suara. TPS yang mengalami tertukar logistik Srikeyangan Sentolo 008 dan 009 kotak suara antara TPS 008 dan 009 tertukar.



KR-Widiastuti
Muh Isnaini STP MM

TPS yang kurang ramah disabilitas Banjarharjo Kalibawang 001 TPS berundak, Gotakan Panjatan 001 TPS berundak Sendangsari Pengasih 012 TPS berundak, Wates Wates 002 TPS berundak.

"PTPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS karena mengalami keceklakan, dan Demangrejo Sentolo 005 PTPS sakit" ujar Isnaini.

Menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kendala tersebut, Bawaslu

Kulonprogo beserta jajaran pengawas adhoc melakukan langkah, dalam kondisi kekurangan dan kelebihan surat suara, PTPS langsung melakukan komunikasi dengan KPPS, PPS dan PPK untuk mencatatkan kejadian; pada kondisi TPS yang mengalami kotak suara yang tertukar, PTPS beserta KPPS dan satuan pengamanan melakukan koordinasi dengan PPS dan langsung menukarkan kotak suara yang tertukar tersebut.

"TPS yang tidak aksesibel, PTPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk diberikan fasilitas yang layak kepada pemilih disabilitas. Serta dalam kondisi PTPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS karena mengalami keceklakan dan sakit, langsung ditindaklanjuti dengan menggantikan tugas PTPS tersebut kepada PKD untuk dilakukan pengawasan," tutur Isnaini. (Wid)

SAMBUT HAB KE-79

Gelar Jalan Sehat Kerukunan Lintas Agama

PENGASIH (KR) - Dalam rangka menyambut Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kulonprogo menggelar Jalan Sehat Kerukunan Lintas Agama, Selasa (10/12). Bertemakan "Umat Rukun Menuju Indonesia Emas", diharapkan seluruh umat dan masyarakat Indonesia bersatu untuk mewujudkan generasi maju.

Acara yang dilepas Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA, dimulai dari Kankemenag menuju Masjid At-Taubat untuk mengambil snack, dilanjutkan ke Gereja Katolik Santa Maria dalam rangka pembagian kupon, dan kembali menuju Kankemenag guna pembagian hadiah dan hiburan. Hadir Ketua MUI



KR-Widiastuti
Pj Bupati, Kepala Kankemenag, dan Ketua MUI ikut jalan sehat.

Kulonprogo Dr HM Jumarni MPd, Kepala Kankemenag HM Wahib Jamil Sag MPd, tokoh agama, ormas, serta masyarakat.

"Kegiatan ini kerja sama antara Kankemenag, MUI, dan Dinas Pariwisata Kulonprogo. Alhamdulillah dalam momen menyambut HAB ke-79 ini Kankemenag

Kulonprogo dan MAN 2 Kulonprogo bisa mempersembahkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Semoga apa yang telah diperjuangkan dari Kulonprogo ini bisa membawa kemajuan pada Kementerian Agama RI dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar

Kepala Kankemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil Sag MPd.

Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA mengajak seluruh peserta untuk bersama menjaga keharmonisan. "Kegiatan Gebyar Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerukunan umat beragama ini adalah wujud nyata dari komitmen bersama menjaga keharmonisan di tengah keragaman yang ada," tutur Siwi.

Gerak Jalan Sehat Kerukunan Lintas Agama ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang sederhana, namun penuh makna. Melalui kegiatan tersebut, bersama-sama menunjukkan bahwa meskipun berasal dari berbagai latar belakang agama, tetap bisa hidup berdampingan dalam kedamaian. (Wid)